

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini masalah lingkungan sedang marak dibicarakan di seluruh dunia. *Global warming* atau pemanasan global dibicarakan di mana-mana. Bencana alam yang sering terjadi saat ini merupakan dampak dari *global warming*. Masyarakat dunia mulai peduli terhadap lingkungan mereka dan berbagai macam cara mereka lakukan untuk memperbaiki kerusakan alam. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mulai tumbuh dan berkembang di semua negara. Puncaknya, ditandatangani Protokol Kyoto oleh beberapa negara di dunia, yang merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC, 1998), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi untuk mengatasi pemanasan global. (Dwijayanti, 2011).

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dapat dilihat pula dari adanya Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional. Pada pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2011, disebutkan bahwa pelaku usaha juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi GRK. Upaya pengurangan emisi GRK (termasuk emisi karbon)

yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku usaha dapat diketahui dari pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*). (Jannah, 2014).

Era *Carbonomics* ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perlindungan lingkungan dan penyelamatan dunia dari persoalan peningkatan pemanasan global. Salah satu dari rekomendasi protokol Kyoto adalah diakuinya skema perdagangan karbon. Oleh karena itu, muncul konsep manajemen biaya karbon (*carbon cost management*), yang termasuk efisiensi emisi CO<sub>2</sub> dalam penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya overhead lingkungan, serta isu-isu yang terkait dengan manajemen standar akuntansi karbon (Ratnatunga, 2007; dalam Ja'far dan Kartikasari, 2009). *Carbon cost management* merupakan era baru penyatuan gagasan transaksi ekonomi berbasis ekologi yang kemudian memunculkan adanya konsep tentang akuntansi karbon (*carbon accounting*).

*Carbon accounting* adalah proses perhitungan banyaknya *carbon* yang dikeluarkan proses industri, penetapan target pengurangan, pembentukan system dan program untuk mengurangi emisi *carbon*, dan pelaporan perkembangan program tersebut (Louis dkk., 2010; dalam Dwijayanti, 2011). Dengan *carbon accounting*, perusahaan dapat mengetahui tingkat emisi *carbon* yang dihasilkannya dari hasil pengukuran, kemudian manajemen perusahaan dapat menetapkan strategi-strategi untuk mengurangi emisi *carbon* tersebut dan melaporkannya kepada *stakeholders* perusahaan. (Dwijayanti, 2011).

Sebagai sebuah entitas, perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang melakukan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan sering tidak memperhatikan

masalah lingkungan karena pemimpin perusahaan berpikir bahwa memperhatikan masalah lingkungan berarti perusahaan harus mengeluarkan biaya. (Damayanti, 2013). Padahal, dengan mengabaikan masalah lingkungan perusahaan akan merasakan dampak yang lebih besar yang dapat mengancam keberlangsungan (*sustainability*) usahanya. Dengan akuntansi lingkungan perusahaan dapat melakukan efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, selain itu pembebanan biaya lingkungan yang terjadi pada setiap produk dapat dihitung secara tepat sehingga perhitungan harga pokok produk dapat lebih realistis. Selain untuk kebutuhan internal perusahaan, kebutuhan akan adanya akuntansi lingkungan juga muncul dari eksternal perusahaan yakni kebutuhan pengguna, pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi sosial dan lingkungan untuk keputusan investasi, menghentikan polusi lingkungan, dan membuat produk yang aman (Belkaoui, 2000; dalam Damayanti, 2013).

Sebagai bagian dari ilmu akuntansi, *Environmental Management Accounting* (EMA) membantu usaha para manajer dalam meningkatkan performa finansial sekaligus kinerja lingkungannya. Secara sistematis, EMA mengintegrasikan aspek lingkungan dari perusahaan ke dalam akuntansi manajemen dan proses pengambilan keputusan. (Damayanti, 2013). Selanjutnya EMA membantu pelaku bisnis/manager untuk mengumpulkan, menganalisis dan menghubungkan antara aspek lingkungan dengan informasi moneter maupun fisik, sehingga EMA harus lebih dapat dikembangkan untuk meminimalisir dampak dari perkembangan industri yang salah satunya adalah masalah *global warming* atau pemanasan global. (Damayanti, 2013).

Suatu perusahaan menghadapi sejumlah pilihan strategis ketika berhadapan dengan isu lingkungan dan para manajer harus memutuskan bagaimana perhatian lingkungan dapat terintegrasi ke dalam strategi perusahaan (Banerje, 2001). Dalam persaingan bisnis, perusahaan dituntut untuk memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin, agar unggul dalam persaingan. Oleh karena itu manajemen perlu memiliki kemampuan untuk melihat dan menggunakan peluang, mengidentifikasi permasalahan, dan menyeleksi serta mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat agar strategi bisnis dapat dilakukan untuk mencapai tujuan (Ismangil, 2002).

Pengukuran kinerja lingkungan ditafsirkan bermacam cara, antara lain yang melihatnya semata kuantitatif, atau hasil proses, atau juga menyertakan kualitatif dan *in-process*. (Purwanto 2003; dalam Sarinda, 2015). Faktor utama mengapa indikator kualitatif penting adalah karena fokus pada manusia itu sendiri sebagai pelaku kegiatan akan menjadi sangat kuat. Eksplorasi penilaian sumberdaya manusia sebagai aset bernilai perusahaan tidak bisa hanya menggunakan indikator kuantitatif yang lebih sesuai diterapkan pada aset fisik saja. (Purwanto, 2012; dalam Sarinda, 2015).

Indikator kualitatif perlu memiliki pola pengukuran yang jelas dan meliputi semua aspek yang ada dalam organisasi. Terdapat banyak cara mengukur kinerja lingkungan seperti halnya ISO (*International Organization for Standardization*) 14001, CERES, *The Natural Step*, dan *Balanced Scorecard*. Setiap metoda tersebut memiliki jawaban tersendiri mengenai kinerja lingkungan, namun setiap jawaban adalah sebagian dari pertanyaan tersebut. (Pojasek, 2001).

Melihat kondisi sekarang ini sangat banyak industri maupun perusahaan yang sistem operasional mereka menghasilkan limbah di Indonesia. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri, terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan, terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Maka di era globalisasi ini industri-industri tersebut harus bekerja dengan baik dan menjaga keeksistensi mereka. Termasuk menerapkan akuntansi karbon di dalamnya dan manajemen yang baik. Perusahaan penghasil limbah diantaranya perusahaan-perusahaan yang memproduksi pupuk, kemudian hotel, rumah sakit dan klinik. Perusahaan tersebut banyak yang menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Menurut PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi menjadi bukti awal bahwa kinerja lingkungan industri di Indonesia masih dinilai buruk. Sebagai contoh adalah pencemaran dan/atau perusakan di daerah Kabupaten Serang, Ahmad Soleh mengatakan bahwa limbah dari PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang hingga kini masih mencemari Sungai Ciujung. (Berita dari koran Suara Pembaruan). Padahal, pihaknya sudah

berkali-kali mengingatkan dan menegurnya, agar memperbaiki sistem pengolahan limbah agar tidak mencemari Sungai Ciujung. “Saya pernah meminta kepada PT IKPP untuk untuk membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) rencana tindakan darurat, membangun kolam pengendapan untuk menurunkan beban limbah cair, menerapkan teknologi swa-pantau otomatis dan memproses izin penimbunan limbah padat,” tegas Soleh, di Serang, Jumat (27/9). Namun menurut Ahmad Soleh, hingga saat ini PT IKPP belum menyelesaikan semuanya. Pihak manajemen PT IKPP selalu menyampaikan banyak alasan sehingga limbah dari perusahaan kertas itu selalu mencemari Sungai Ciujung. Bahkan menurutnya, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang juga telah merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengingat banyak permasalahan yang dilakukan PT IKPP, khususnya pencemaran lingkungan dan pencemaran sungai. (Berita dari koran Suara Pembaruan yang diunggah tanggal 28 September 2013).

Permasalahan lingkungan terus menjadi sorotan serta perbincangan, dan saat ini dalam dunia bisnis terjadi peningkatan usaha dalam hal pengelolaan serta pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan adanya dorongan dari luar perusahaan. Sebagai contoh adalah dorongan yang disebabkan oleh tekanan lingkungan. (Nuraini, 2010). *International Finance Corporation* (IFC) menyebutkan contoh mencolok dari tekanan lingkungan yang relevan dalam level internasional antara lain pertama adalah tekanan rantai nilai seperti perusahaan besar mewajibkan pemasok mereka untuk mengikuti *Standard Environmental Management System* (EMS) yang sesuai ISO. Kedua, tekanan untuk mengungkapkan kinerja lingkungan di dalam laporan keuangan tahunan atau dengan pelaporan yang



bersifat sukarela (*voluntary*). Ketiga, tekanan pembiayaan melalui dana *worldwide growth of social responsible investment* (SRI), sistem penilaian investasi seperti pada *Dow Jones Sustainability Index* dan persyaratan pengungkapan peraturan investasi. Keempat, tekanan peraturan kendali seperti *RoHS Directive* yang merupakan peraturan di Uni Eropa yang mengatur penggunaan bahan kimia tertentu dalam peralatan elektrik yang dijual di wilayah tersebut. Kelima, tekanan pajak lingkungan seperti pajak penggunaan energi, biaya pengeluaran emisi dan sebagainya. Serta yang terakhir adalah adanya tekanan untuk mematuhi Protokol Kyoto mengenai masalah lingkungan hidup.

Pencapaian kinerja lingkungan yang baik bukanlah tujuan akhir perusahaan. Perusahaan berharap bahwa dengan kinerja lingkungan yang baik maka kinerja keuangan sebagai tujuan akhir juga dapat ditingkatkan, sebagaimana dikemukakan oleh De Beer dan Friend (2006) bahwa saat ini industri menjadi peduli dengan aspek lingkungan karena meyakini adanya pengaruh terhadap keuangan perusahaan. Dalam persaingan di era ekonomi global saat ini, manajer harus meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan karena perusahaan pesaing juga melakukannya. (Al-Tuwaijri et al, 2004).

Dewasa ini diketahui bahwa kemajuan di bidang industri sangat pesat. Di Indonesia sendiri sudah banyak industri berdiri, baik dari industri mikro maupun industri yang besar, salah satu industri tersebut adalah industri manufaktur. Salah satu yang termasuk manufaktur adalah industri tekstil. Industri tekstil merupakan salah satu andalan pemerintah dalam bidang ekspor untuk memperoleh hasil devisa, khususnya dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Komunitas ASEAN. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu

pemasok tekstil dan produk tekstil (TPT) yang mampu memenuhi 1,8 persen kebutuhan dunia dengan nilai ekspor mencapai 12,48 miliar dolar AS atau setara dengan 10,7 persen dari total ekspor non-migas. (Republika.com, 2014). Namun demikian, para pengusaha dibidang industri tekstil tersebut tidak memikirkan cara pengolahan limbah yang dihasilkan secara serius. Sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. (Nuryanti, dkk, 2015).

Isu-isu tentang manajemen biaya karbon (*carbon cost management*) akan berimplikasi pada isu strategis lain terkait dengan akuntansi manajemen. Sekali biaya carbon suatu produk diketahui, berbagai isu strategis dibidang akuntansi manajemen akan dapat dikembangkan. Dalam hal ini, termasuk efisiensi emisi CO<sub>2</sub> dalam penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya overhead lingkungan, serta isu-isu yang terkait dengan manajemen biaya karbon, corporate governance, standar akuntansi karbon dan strategi audit (Ratnatunga, 2007).

Kesadaran tentang lingkungan juga mulai tumbuh pada masyarakat di Indonesia sejak banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan semakin bertambahnya jumlah industri di Indonesia, polusi industri juga meningkat, khususnya polusi udara. Oleh karena itu, masalah lingkungan saat ini menjadi hal yang penting untuk dibicarakan dan dicarikan solusinya oleh pemerintah dan *carbon accounting* bisa menjadi solusi yang baik untuk Indonesia. Namun sayang, *carbon accounting* ini di Indonesia belum diterapkan dan masih berupa wacana saja.



Selg (1994) menyatakan bahwa salah satu cara untuk melakukan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang adalah dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Bebbington (2001) menyatakan bahwa akuntansi memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola hubungan antara perusahaan dengan lingkungan.

Penelitian Pfleiger *et.al* (2005), menunjukkan bahwa usaha-usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya adalah ketertarikan pemegang saham dan *stakholder* terhadap keuntungan perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggungjawab dimata masyarakat. Penelitian-penelitian lain yang dilakukan di Indonesia menunjukkan adanya minat perusahaan yang cukup tinggi untuk meningkatkan kinerja lingkungan, (Susi, 2005; dalam Yanita, dkk, 2014).

Sebagian besar perusahaan dalam industri modern menyadari sepenuhnya bahwa isu lingkungan dan sosial juga merupakan bagian penting dari perusahaan (Pfleiger, et al, 2005). Ferreira (2004) menyatakan bahwa persoalan konservasi lingkungan merupakan tugas individu, pemerintah dan perusahaan. Sebagai bagian dari tatanan sosial, perusahaan seharusnya melaporkan pengelolaan lingkungan perusahaannya dalam *annual report*. Hal ini karena terkait tiga aspek persoalan kepentingan yakni keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan kinerja sosial. Permasalahannya saat ini, pelaporan lingkungan dalam *annual report* di sebagian besar negara masih bersifat sukarela, termasuk Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Carbon Accounting Terhadap Perencanaan Strategi Dan Kinerja Lingkungan.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis sebagai berikut: Bagaimana pengaruh *carbon accounting* terhadap perencanaan strategi dan kinerja lingkungan pada perusahaan di Jawa Barat yang terdaftar di PROPER 2014?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaruh *carbon accounting*, perencanaan strategi dan kinerja lingkungan pada perusahaan di Jawa Barat yang terdaftar di PROPER 2014.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak lain. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

### 1. Kegunaan/Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada ilmu bidang akuntansi dan membahas perhitungan tentang *carbon accounting*, serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya di bidang akuntansi mengenai *Carbon Accounting*, kinerja lingkungan dan menjadi

sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan/Manfaat Praktis

Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dan membantu memahami pengungkapan informasi yang berkaitan dengan *carbon accounting* (mengapa mereka perlu mengungkapkan hal tersebut) sebagai dasar penentuan perencanaan strategi dalam pengambilan keputusan bagi manajemen dan kinerja lingkungan pada perusahaan tersebut.

